

## Kemungkinan Pengembangan Tebu di Kawasan Selatan Pulau Jawa dan Pulau Madura

Sebagian besar pabrik gula Indonesia berdosimili di Pulau Jawa dan hampir semua adalah peninggalan Belanda yang umurnya rata-rata > 120 tahun. Sejak zaman Belanda hingga era tahun 1970-an pabrik gula menyewa lahan petani sehingga budidaya tebu harus disesuaikan dengan petunjuk teknis dan rendemen tebu berkisar 10-12 persen.

Setelah itu sistem pengembangan tebu berubah dari sistem sewa menjadi sistem Tebu Rakyat Indensifikasi (TRI) yaitu petani menanam tebu dan pemerintah memberikan paket kredit serta ada pendampingan teknologi budidaya tanaman tebu dari para Penyuluh Pertanian Lapangan Pabrik Gula (PPLPG). Pengembalian kredit dilakukan saat penjualan tebu kepada pabrik gula yang ada perhitungan rendemen, sehingga pembelian pabrik gula dihitung dalam bentuk gula dan pembayaran dari pabrik gula kepada petani tebu setelah dipotong nilai kredit beserta bunganya. Mulai era tahun '90 an sampai saat ini sebagian besar dalam sistem Tebu Rakyat Bebas (TRB), yaitu petani dapat mengambil paket kredit maupun tidak untuk modal usaha tani tebu, di samping itu pendampingan teknologi tidak intensif, sehingga tingkat budidaya tanaman tebu bervariasi dalam hal pemberian input pupuk maupun yang lainnya. Penampilan tanaman tebu di lapangan beragam tergantung tingkat keterampilan petani beserta besarnya input yang diberikan pada tanaman tebu. Pada sistem TRB ini rendemen tebu berkisar 5-7%.

Kawasan Selatan Pulau Jawa maupun Madura didominasi lahan kering tadah hujan dan dibandingkan dengan kawasan tengah maupun kawasan Utara Pulau Jawa tanaman semusim yang diusahakan relatif kurang beragam, sehingga ada kemungkinan pengembangan tebu akan lebih cepat di kawasan ini. Apalagi bila ditunjang dengan paket kredit sarana produksi berupa pupuk, biaya hidup dan sebagainya.

Dari aspek ekonomi, kedua kawasan tersebut di atas sementara ini paling efisien dibandingkan dengan pengembangan di luar Jawa, terutama dalam hal pengangkutan hasil tebu ke pabrik-pabrik gula yang sebagian besar berdomisili di Pulau Jawa. Pengembangan tebu di luar Jawa bisa bersaing bila diiringi dengan pembangunan pabrik gula yang berdekatan dengan areal pengembangan tebu. Di samping itu apabila teknik budidaya tebu pada lahan kering dilaksanakan dengan benar pada kedua kawasan tersebut, maka tanaman tebu lebih mempunyai keunggulan kompetitif dibanding tanaman semusim yang lain. Prasarana dan sarana jalan yang sangat diperlukan dalam urusan transportasi tebu dari lahan ke pabrik gula perlu pembenahan yang memadai agar tidak cepat rusak. Dalam hal ini pembangunan jalan aspal *Hot Mix* atau paving yang berkualitas lebih diutamakan daripada jalan aspal kelas IV (jalan penghubung antar kecamatan/ antar desa) yang umumnya berumur 2-3 tahun, jika sering dilewati kendaraan bermuatan berat.

Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan dalam usaha tani tebu, apalagi jika pengusaha tebu masih tradisional. Kebutuhan tenaga kerja cukup banyak pada saat pengolahan tanah, tanam, penyiangan, "roges" (pengelentekan daun tebu) yang dilaksanakan 1-2 kali, panen dan pasca panen (pengangkutan). Untuk kawasan Pulau Madura perlu didukung dengan 1-2 pabrik gula. Tidak adanya pabrik gula, menyebabkan tebu dari Pulau Madura menuju pabrik gula terdekat di Kabupaten Sidoarjo menjadi tidak efisien dari aspek biaya transportasinya. Produktivitas tebu pada lahan kering tadah hujan berkisar 80 s/d 130 ton per hektar, sedangkan lahan sawah irigasi teknis bisa mencapai 200 ton per hektar.



Tanaman tebu pada masa pertumbuhan (umur 6 bulan)

Tebu yang dijual dengan sistem tebasan, harga tergantung kesepakatan antara pembeli dengan petani, misalnya Rp 30.000.000,- per hektar. Untuk sistem timbangan harga tebu berkisar Rp 35.000,- - Rp 40.000,- per kuintal. Jika produksi tebu 130 ton per hektar maka penerimaan petani sebesar: Rp 45.500.000,- - Rp 52.000.000,- per hektar. Namun dengan sistem pemasaran ini petani masih mengeluarkan biaya panen, penimbangan, pengangkutan dari lokasi (lahan petani) ke penggul/ pabrik gula jika dengan sistem bagi hasil dengan pabrik gula maka petani akan memperoleh  $5,44 \text{ kg} \times \text{Rp } 9.000,-$  (harga gula di tingkat petani)  $\times 1300 = \text{Rp } 63.648.000,-$  per hektar. Namun dengan sistem pemasaran ini petani juga mengeluarkan biaya panen (tebang tebu), penimbangan dan pengangkutan dari lokasi (lahan petani) ke pabrik gula.

Pada sistem pemasaran bagi tergantung dari tingkat rendemen yang ditentukan berdasarkan analisa laboratorium di masing-masing pabrik gula. Di samping itu untuk sistem pemasaran "bagi hasil gula" ini petani mendapatkan tambahan Rp 3.000,- per kuintal tebu yaitu sebesar Rp 3.000,-  $\times 1300$  kuintal tebu : Rp 3.900.000,- per hektar (untuk produktivitas 130 ton tebu/ Ha). Jadi untuk sistem ini petani mendapatkan penerimaan sebesar = Rp 63.648.000,- + Rp 3.900.000,- = Rp 67.548.000,- per hektar. Untuk tebu yang baru tanam (tahun ke I) biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp 40.000.000,- per hektar, sedangkan tebu "kepras" (tahun ke 2 dst) biaya produksi berkisar Rp 20.000.000,- s/d Rp 25.000.000,- per hektar. Pada tingkat produktivitas tebu 130 ton per hektar, maka keuntungan/pendapatan petani pada tahun ke I Rp 27.548.000,- dan pendapatan petani meningkat pada tahun ke 2 dan seterusnya (Teger Basuki/ Peneliti Balittas).

### Pelindung

Dr. M. Syakir (Kepala Pustitbang Perkebunan)

### Penanggung Jawab

Dr. Joko Pitono

### Pemimpin Redaksi

Dr. S. Joni Munarso

### Anggota

Prof Dr. Elma Karmawati

Prof Dr Bambang Prastowo

Dr. Agus Wahyudi

Dr Sabarman Damanik

Dr Nurliani Bermawie

### Redaksi Pelaksana

Dr. Iwa Mara Trisawa

Dr Wiratno

Evawati, B. Sc.